

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Tahun XIV, Nomor 2, April 2001

ISSN 0216-2407

**Asal-Mula Orang Jawa :
Suatu Tinjauan Antropologis**
Josef Glinka

**Pengaruh Sosialisasi Gender
pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik**
Dwi Windyastuti

Konsolidasi Demokrasi
Kris Nugroho

**Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan
dalam Perdagangan Perempuan (*Trafficking*) untuk Prostitusi**
Yayan Sakti Suryandaru

**Makna Realitas Sosial Iklan Televisi
dalam Masyarakat Kapitalistik**
Burhan Bungin

Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia
Lilik Salamah

**Resensi Buku
Mengurai Pertikaian Etnis : Migrasi Swakarsa Etnis Madura
ke Kalimantan Barat**
Doddy S Singgih

MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai terbitan berkala empat bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum yang efektif bagi komunikasi belajar mengajar.

Pemimpin Umum
Sri Sanituti Hariadi

Penanggungjawab
I Basis Susilo

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto
A Ramlan Surbakti
Hotman M Siahaan
Dede Oetomo

Pemimpin Redaksi
Wahyudi Purnomo

Sekretaris Redaksi
Hariono

Redaksi Pelaksana
Priyatmoko
T Sumarnonugroho
Sutinah
Yusuf Ernawan

Produksi dan Marketing
Wisnu Pramutanto
Suyono

STT No 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi
FISIP Unair
Jl Airlangga 4-6
Surabaya 60286,
Indonesia
Tilpon 031-5034015
Fax 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Ketentuan Minimal untuk Penulis

1. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.
2. Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).
3. Menyerahkan *printout* dan *copy* disketnya
4. Judul dibuat jelas, ringkas dan padat.
5. Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.
6. Isi tulisan berkaitan erat atau disesuaikan dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.
7. Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum keilmiah.
8. Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
9. Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.
10. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.
11. Kutipan ditulis secara *running notes*. Kutipan dan kepastakaan disusun menurut contoh berikut.

Kutipan:

..... (Kennedy, 1993:145-9).

Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, *Preparing for the Twenty-First Century* (London: Harper Collin Publisher, 1993).

McEachern, Dough, "Clash Analysis," in Andrew Parkin et al., (eds.), *Government, Politics, Power and Policy in Australia*, 5th edn. (Melbourne: Longman Cheshire, 1994).

12. Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.
13. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi dan pokok pikiran penulisnya.

PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 2, April 2001 berisi enam artikel dan satu resensi buku. Enam artikel membahas bidang kajian antropologi ragawi, gender, komunikasi, ekonomi dan politik. Tulisan mengenai kajian antropologi ragawi ditulis Josef Glinka, persoalan gender ditulis oleh Dwi Windyastuti dan Yayan Sakti Suryandaru, bidang ilmu komunikasi ditulis oleh Burhan Bungin, bidang kajian ekonomi dilakukan oleh Lilik Salamah, dan bidang ilmu politik ditulis oleh Kris Nugroho, bidang ilmu . Sementara itu, resensi buku dilakukan oleh Doddy S Singgih. Mereka ini merupakan sebagian tulisan yang telah masuk pada meja redaksi dan dapat dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Dalam edisi ini kami menyertakan asal perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan para penulis di bawah nama penulis, agar sidang pembaca dapat mengetahui secara segera siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari bahwa informasi mengenai latar belakang penulis tidak dituliskan selengkap sebelumnya.

Dalam edisi ini, kami berupaya tetap mempertahankan keberadaan "Indeks Penulis dan Tulisan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* sejak Edisi 1999". Kami berharap sidang pembaca dapat mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah pernah dimuat di jurnal ini. Apabila diantara sidang pembaca memerlukan hasil-hasil tulisan yang pernah dimuat sebelum edisi ini, dapat menghubungi kami di alamat, tilpon atau e-mail seperti yang telah tertera dalam rubrik ini.

Sekali lagi kami mohon maaf bila masih terdapat beberapa kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang terkesan dipaksakan untuk mengejar kerapian kolom. Di samping itu, ketika kami banyak mendapatkan kiriman artikel, sebenarnya kami ingin sekali dapat memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksi sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Sampai saat ini kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai tulisan-tulisan yang telah dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel terhadap hasil pemikiran-pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan produktif (*a productive and creative learning community*) di tengah-tengah masyarakat luas.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
Asal-Mula Orang Jawa: Suatu Tinjauan Antropologis Josef Glinka	1
Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik Dwi Windyastuti	9
Konsolidasi Demokrasi Kris Nugroho	25
Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (<i>Trafficking</i>) untuk Prostitusi Yayan Sakti Suryandaru	35
Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik Burhan Bungin	51
Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia Lilik Salamah	65
Resensi Buku: Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat Doddy S Singgih	77
Indeks Penulis dan Tulisan	81

KONSOLIDASI DEMOKRASI

Kris Nugroho

Dosen FISIP Unair; lulusan Unair (S-1) dan UI (S-2)

Abstract

Political transition in Indonesia is a crucial phase that determines political stability in the future. Indonesian political system will be more democratic if it has two conditions: (a) the political institutions work as political instrument for political accomodation of the people, and (b) political elite reduces their political conflicts, develops a strong concensus for the future of political reform.

Keywords: Indonesia, elite, consolidation, political reform, democratisation, consolidation

Kelangsungan masa depan suatu sistem politik yang tengah mengalami transisi menuju demokrasi sangat bergantung sekali pada keberhasilannya dalam melewati proses transisi menuju demokrasi politik secara stabil, damai atau non kekerasan. Adanya transisi politik secara damai akan memberi penekanan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada beserta elitnya baik pada lapisan elite mau pun pada lapisan masyarakat berada pada ketahanan yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan politik yang berlangsung beserta konsekuensi-konsekuensinya.

Beberapa sistem politik berhasil dalam proses transisi demokrasi, tapi ada pula beberapa di antaranya yang melaluinya (transisi demokrasi) dengan penuh gejolak bahkan berada dalam ancaman keruntuhan nasional. Be-

berapa negara Eropa Timur lebih berhasil melalui masa-masa transisi demokrasi dengan sukses yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu bebas yang diikuti banyak partai. Tapi untuk kasus Uni Soviet, agaknya berjalan lain, yaitu transisi demokrasi yang dipelopori dengan munculnya ide-ide radikal tentang keterbukaan dan restrukturisasi politik dari presiden Michael Gorbachev menghasilkan Uni Soviet yang terpecah-pecah ke dalam ikatan-ikatan negara-negara etnik.

Di Indonesia, proses transisi demokrasi yang diawali dari kejatuhan regim orde baru Soeharto tahun 1998 berlangsung dengan penuh gejolak konflik elite, konflik etnik, agama dan munculnya gerakan pemisahan (separatisme). Melihat situasi dan perkembangan terakhir dalam politik nasional, ada kecenderungan bahwa transisi

menuju demokrasi secara damai atau non kekerasan masih jauh dari kenyataan. Sebaliknya, fenomena dan ancaman terjadinya kekerasan politik tetap lah tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang sedang bergolak seperti Aceh, kepulauan Maluku dan Papua (Irian Jaya). Konflik kedaerahan -- primordial dalam perspektif, etnis dan agama-- menunjukkan peningkatannya.

Dampak konflik antar elite politik, elite vs massa serta munculnya fenomena kekerasan daerah demikian akan merenggangkan hubungan antar elemen-elemen bangsa, menciptakan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah serta berpotensi ke arah terjadinya disintegrasi bangsa.

Sementara itu, tak dipungkiri, suhu politik juga makin meninggi di pusat kekuasaan (Jakarta) berkaitan dengan respon kalangan partai-partai politik di DPR yang menilai bahwa kinerja pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid sangat buruk. Tekanan agar Presiden Wahid mundur secara suka rela digemakan kalangan oposisi dan mahasiswa. Sementara upaya untuk mempertahankan posisi kepresidenan Wahid makin kecil, maka akhir pemerintahannya tinggal menghitung hari. Upaya untuk melakukan SI MPR guna menurunkan Presiden Wahid pun dilancarkan terutama oleh kalangan parpol seperti poros tengah, PDI P dan Golkar yang pada SU 1999

mendukung tampilnya Wahid sebagai presiden. Dampak pemanasan suhu politik elite nasional ini membuat hubungan antara massa NU-Muhammdyah berada dalam situasi saling curiga karena salah satu motor oposisi terhadap Presiden Wahid adalah ketua MPR sekaligus ketua umum PAN dan tokoh poros tengah Amien Rais.

Konvergensi antara model konflik horisontal (primordial) dan vertikal (elite) tidak saja akan mempengaruhi relasi-relasi kekuasaan di tingkat nasional mau pun lokal tapi juga akan memupuskan harapan bagi berkembangnya institusionalisasi nilai-nilai dan kesepakatan-kesepakatan demokrasi yang dulunya pernah menjadi cita-cita bersama para elite di awal gerakan reformasi. Semua indikator ketidakstabilan politik domestik di atas memberi penekanan bahwa konsolidasi demokrasi kalangan sipil di Indonesia secara politik sangat lemah yang salah satu sebabnya adalah kuatnya kepentingan-kepentingan politik mereka yang terfragmentasi

Konsep Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun

masyarakat politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6). Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesempatan bersama menyangkut "nilai-nilai politik" yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

Suatu regime politik sipil presiden yang sedang mengalami transisi demokrasi diperhadapkan dua pilihan. Pertama, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang padu (solid) ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik. Kedua, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa.

Sedangkan makna transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tak sama dengan fase pertama. Kongkritnya, transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan regim politik dari tipe otoriter menuju regim politik pasca otoriter (O'Donnel dan Schmitter 1997:6-7).

Menurut O'Donnel dan Schmitter (1997), masa transisi umumnya ditandai dengan munculnya "liberalisasi", yaitu proses pengaktifan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan negara

atau pihak ketiga. Dengan demikian, liberalisasi dikaitkan dengan iklim pengembangan kebebasan hak-hak untuk menjalin atau mendapatkan akses politik yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini bisa berarti liberalisasi politik dalam konteks timbulnya pluralisme politik.

Dalam bahasa Giovanni Sartori (1997:62), pluralisme politik diidentikan dengan "diversification of power" atau polyarchy yaitu kondisi di mana distribusi kekuasaan politik terpecah di sejumlah kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi monopoli kekuasaan politik di satu struktur kekuasaan tertentu (monolitik). Yang terjadi adalah dinamika peta isu-isu politik dan kepentingan, masyarakat "terbelah" ke dalam asosiasi-asosiasi kepentingan yang saling berkonflik, berkonsensus dan bahkan bertoleransi untuk mencapai keseimbangan baru.

Berikutnya adalah proses demokratisasi politik, yaitu mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik secara stabil. Meminjam istilah Huntington, demokratisasi dikaitkan dengan institusionalisasi politik di mana tuntutan-tuntutan serta dukungan-dukungan politik dari publik mendapat tempat secara prosedural dalam kerangka suatu penyelesaian konflik.

Masa transisi sangatlah kritis sebab tak ada jaminan bahwa proses transisi akan selalu menghasilkan regim demokratis. Pergolakan-pergolakan internal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, budaya dan politik berpeluang menjadi ketidakpuasan massal yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Begitu pula, sikap-sikap politik otoriter akan kembali lagi berkuasa bilamana kohesi regim transisi lemah atau tidak kredibel secara politik sehingga mendorong kekuatan-kekuatan pro regim lama yang otoriter bangkit kembali.

Untuk kasus Indonesia, transisi demokrasi dimulai dengan tanda-tanda berikut: krisis ekonomi domestik yang berdampak pada krisis keuangan dan perbankan serta munculnya penolakan massa terhadap perangkat-perangkat politik regim seperti militer, Golkar sebagai partai penguasa, birokrasi dan presiden. Penolakan massa atas simbol-simbol regim ini menggoyahkan kemapanan politik yang dibangun 3 dekade melalui instrumen kekerasan militer, ideologi dan pengekan oposisi.

Dalam konteks perubahan politik dan dikaitkan terjadinya gelombang demokratisasi politik yang melanda banyak sistem politik di era 1990-an, transisi demokrasi ditandai dengan munculnya regim-regim politik baru di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika yang sedang bergerak menuju demokrasi. Termasuk dalam hal ini,

regim sipil Presiden Wahid bisa dikatakan mewakili regime transisi dari authoritarian regime ke post authoritarian regime yang lebih demokratis, dengan kecenderungan-kecenderungan visi dan misi politiknya yang masih perlu diperdebatkan.

Hal lain mengapa konsolidasi demokrasi perlu dilakukan adalah untuk membangun regime demokratis yang kuat dan melembaga setelah runtuhnya regime otoriter. Setelah regime otoriter berakhir, situasi politik tidak menentu (chaos), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna melembagakan konflik-konflik politik yang muncul.

Dengan demikian, tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokratis baru setelah pemerintahan otoriter runtuh adalah dibangunnya regime demokratis yang meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian regime demokratis baru (Huntington 1995:45).

Asumsi di balik perlunya konsolidasi demokrasi adalah lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal kerun-

tuhan regime otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta ideologi politik yang juga berbeda. Di samping itu, visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih cenderung terpolarisasi. Mengutip pendapat Chalmers Johnson, dalam era perubahan politik, khususnya revolusi dan reformasi politik besar, ketidakseimbangan selalu muncul yakni suatu situasi di mana nilai-nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan para elite politik, masyarakat, institusi-institusi politik dan sistem ekonomi tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Dengan situasi tersebut, konflik-konflik politik acapkali berlangsung terbuka.

Prioritas politik menyangkut arah transisi demokrasi menjadi faktor penting yang harus disepakati oleh para elite politik. Dalam permasalahan ini (transisi demokrasi), kata reformasi politik menjadi substansial karena tujuan selama fase transisi adalah menghadirkan regim politik baru dengan prioritas kebijakan-kebijakan reformasi politik besar. Kebijakan-kebijakan reformasi politik besar ini meliputi empat aspek (Michael dan Dickson 1998:4-5).

1. Hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya basis yang dipakai negara untuk

memperoleh respon-respon masyarakat terhadap terhadap perintah-perintahnya, yaitu basis legitimasi dan dukungan;

2. hubungan antara negara dan ekonomi;
3. distribusi kekuasaan dan otoritas di antara dan di dalam institusi-institusi politik dan kenagaraan yang utama (kepala negara, militer, kehakiman, kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, birokrat pusat, daerah dan lokal);
4. hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik negara dengan dunia luar.

Kasus Indonesia: Ketidakpastian

Mengamati proses transisi menuju demokrasi untuk kasus Indonesia akan nampak bahwa fase transisi demokrasi akan ditempuh relatif panjang dan bergejolak. Diwarnai konflik elite politik, konflik primordial dan ancaman-ancaman pemisahan diri dari beberapa propinsi (Aceh dan Papua/Irian Jaya), transisi demokrasi di Indonesia berlangsung dalam konteks rendahnya kohesi sosial.

Hal ini nampak sejak awal tampilnya partai-partai politik baru yang kini memperoleh kursi di DPR masih jauh dari adanya kepaduan misi politik guna menyukseskan demokratisasi politik. Bahkan pembagian "historis politis" antara kelompok status quo --yang diidentikan pen-

dukung orde baru-- dengan kelompok pro reformasi kian jelas. Kini garis kepentingan politik bukan ditentukan oleh masa lalu yang anti status quo, tapi oleh sejauhmana terjalin titik temu yang sama di antara kekuatan-kekuatan politik untuk melancarkan tindakan politik bersama ke arah suatu kepentingan politik tertentu. Misalnya, politisasi kasus pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, dan Buloggate guna mengejar Presiden Wahid sampai pada tingkat bersalah sehingga layak di-SI-kan.

Dalam satu segi pemerintahan sipil Presiden Wahid cukup berhasil dalam memperlebar sayap "masyarakat warga", yang ditandai dengan makin bebasnya wacana demokrasi, kebebasan, independensi politik dan mendidik masyarakat untuk mampu membedakan antara wilayah kewenangan pemerintah/negara dan wilayah di mana masyarakat bisa mengurus kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, Presiden Wahid setidaknya telah mengupayakan satu aspek dari empat aspek yang oleh Oksenberg dan Dickson (dikemukakan terdahulu).

Dalam bahasa politis, Presiden Wahid telah melakukan proses dekonstruksi legitimasi politik antara negara dan masyarakat dan di satu sisi mengurangi efek politis atas lembaga kepresidenan yang sangat dikeramatkan oleh di masa orde baru. Dekonstruksi politik ini terjadi berkat adanya amandemen oleh MPR atas pasal-pasal UUD

1945, terutama pasal-pasal yang memberi bobot kekuasaan yang besar kepada lembaga kepresidenan. Desakralisasi lembaga kepresidenan ini akan menjadi babakan baru dalam hubungan DPR- presiden (pemerintah) di mana yang pertama diharapkan akan mampu memainkan peran kontrol politiknya atas pemerintah secara proporsional.

Titik didih untuk memasuki babakan politik yang secara kualitatif penuh kekerasan sebetulnya telah dimulai tatkala terjadi perang pernyataan antar elite politik berkenaan dengan karakteristik pemerintahan Presiden Wahid.

Banyak kalangan politisi yang dulu mendukung Presiden Wahid, sekarang berbalik menyerang. Aliansi strategis partai-partai pendukung Presiden Wahid satu per satu menyatakan kekecewaan mereka atas kinerja pemerintahannya yang dinilai kontroversi dan *one man show*. Mereka mengkritik keras Presiden Wahid atas kegagalannya dalam menanganni Aceh dan Papua. Mereka juga menilai pemerintahannya tidak punya visi yang jelas dalam menangani kasus-kasus BLBI, mengintervensi BI dan terlibat bagi-bagi posisi di departemen basah. Tuduhan neo KKN pun mencuat seiring meledaknya skandal uang 35 milyar milik Yanatera Bulog yang diduga melibatkan Presiden Wahid. Adanya penyelidikan intensif DPR dengan membentuk Pansus Bulog yang

saat ini sedang berjalan, diharapkan akan mengungkapkan posisi sebenarnya Presiden Wahid dalam kasus Bulog ini.

Dalam setahun ini kita juga melihat, suhu politik meningkat seiring makin buruknya komunikasi politik antara politisi DPR dengan pemerintah. Buruknya komunikasi politik keduanya ini tidak saja disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik praktis antara pemerintah dengan kekuatan partai-partai, tapi juga disebabkan oleh tidak adanya konsensus politik minimal yang dibutuhkan sebagai modal menyusun desain besar reformasi politik ke depan. Yang justru terjadi adalah gesekan-gesekan politik yang direspon secara emosional oleh elite pemerintah dan non pemerintah.

Sebagai contoh, dinamika politik sepanjang 2000 diwarnai oleh benturan interpretasi hukum/normatif atas beberapa langkah kebijakan Presiden Wahid (kasus pencopotan Laksamana, Kalla dan Rusdihardjo) yang dinilai partai-partai di luar kubu Presiden Wahid sebagai tidak konstitusional. Artinya, kita melihat, demokrasi normatif dan institusional (UUD, partai politik dan parlemen) yang berfungsi sebagai instrumen pelebagaan konflik dalam kenyataannya, tidak mampu menjadi payung politik yang menaungi kepentingan-kepentingan politik bangsa yang lebih luas.

Titik krusial dinamika politik saat ini adalah bagaimana elite-

elite politik menyadari betapa berat konsekuensi yang akan terjadi jika halangan-halangan demokrasi tidak bisa diatasi. Sistem yang tengah dibangun akan ambruk secara politik kalau misalnya wilayah-wilayah yang bergolak memilih eksistensi politiknya sendiri. Tatanan politik juga terancam hancur jika tensi pergolakan politik kedaerahan tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan politik lokal dan nasional sehingga tidak mampu diselesaikan secara damai.

Pemburukan situasi politik ini jelas akan memudahkan rentang kendali legitimasi Jakarta. Pemerintah mulai kehilangan kontrol kewenangan politiknya atas masyarakat. Kewibawaan pemerintah pun dipertanyakan mengingat ketidakmampuannya mengendalikan konflik-konflik horisontal yang saat ini di Aceh Maluku dan Papua.

Dengan demikian, masa transisi menuju demokrasi di Indonesia cenderung akan berjalan keras atas dasar pertimbangan konvergensi faktor struktural dan kultural berikut : ketiadaan kewibawaan hukum, pijakan norma-norma demokrasi masih lemah, perbedaan tafsir elite atas arah reformasi politik, adanya elite-elite oportunis politik yang hanya sekedar ingin berkuasa dan potensi tak terkendali aksi-aksi kekerasan massa yang dengan mudah menyulut terjadinya kerusuhan sosial. Konvergensi demikian dalam kenyataannya telah mengha-

silkan pusaran dinamika politik yang sangat destruktif bahkan di beberapa wilayah, tertib politik terancam runtuh.

Ancaman ambruknya institusi demokrasi ini dimungkinkan selain karena gagalnya resolusi konflik, juga dimungkinkan oleh makin banyaknya konflik-konflik sosial politik yang cenderung diselesaikan lewat jalur non institusional (kekerasan). Politik kekerasan ini tak harus berwujud fisik, tapi juga ancaman-ancaman ideologi dan penggunaan bahasa (jargon politik) sebagai pembenar kekuasaan politik tertentu.

Adanya perilaku elite baik di dalam pemerintah dan di luar pemerintah yang masih menggunakan bahasa-bahasa ancaman seperti ini, menggambarkan betapa institusi demokrasi saat sedang di ambang keambrukannya. Seiring gejala ini, kewibawaan pemerintah, institusi politik dan hukum makin menurun, setidaknya hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat menggunakan cara-cara kekerasan sebagai jalan keluar menyelesaikan suatu masalah. Hal menggambarkan juga, betapa legitimasi politik dan hukum sudah di ambang keambrukannya. Dengan sendirinya, legitimasi pemerintah pelan-pelan mulai tercabut dan membuat pemerintahan saat ini terlalu sulit untuk mengonsentrasikan diri guna melakukan konsolidasi demokrasi secara luas.

Secara politik, kewibawaan Presiden Wahid sudah tidak ada

apa-apanya dengan jangkauan kekuasaan politik yang makin memudar. Pada saat yang sama ia dituntut untuk menggolkan salah satu misi reformasi, yaitu pengusutan kasus dugaan KKN Soeharto dan kroni-kroninya. Tapi pada saat yang sama politisasi atas kasus-kasus seperti Bulog dan BI akan membuat citranya makin merosot.

Keberhasilannya untuk memulihkan kredibilitas politik pemerintahannya tergantung pada kemampuannya membalik arah pendulum politik, dari pihak yang diserang menjadi pihak yang mengendalikan dan menyerang musuh-musuhnya. Tapi kalau tidak, posisi kepresidenannya tidak akan bertahan sampai SU MPR 2001.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, transisi demokrasi merupakan titik krusial yang harus dilalui dengan aman di mana respon-respon elite terhadap persoalan-persoalan politik domestik harus menghasilkan konsensus minimal atau *political pact* antar aktor politik yang berkonflik (Patriadi, 2001:7). Artinya antar elite harus tercipta kondisi politik yang kondusif bagi lahirnya komitmen untuk menyelamatkan arah reformasi politik dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan minimal menyangkut persoalan-persoalan reformasi domestik. Skala prioritas politik apa yang harus diwujudkan di awal transisi juga harus dirundingkan di antara elite tanpa mengurangi hak-hak

dan kewenangan politik pihak yang memegang kendali pemerintahan.

Dalam konteks perubahan politik yang cepat dan terfragmentatif seperti di Indonesia ini, tepatlah kalau elite mengembangkan *consosional democracy* (Przeworski, 1995:11) Inti demokrasi konsosional ini adalah antar politik yang rivalitas saling mengakui bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang esensial yang perlu diselesaikan. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk saling mengakui eksistensi setiap segmen politik yang ada sehingga yang muncul adalah pergolakan politik transisional yang terkendali tanpa mengorbankan hakekat reformasi itu sendiri. Untuk itu arah pergolakan politik harus berubah dari corak *zero sum conflict* ke *non zero sum conflict* di mana terdapat konsensus-konsensus guna menyelamatkan arah reformasi politik.

Untuk itu, arah permainan politik harus berubah di dua arah, dari arah presiden yang harus secepatnya mengubah gaya permainan politiknya dengan menciptakan "solusi damai" dengan poros-poros kekuasaan yang kini dijauhinya dan dari arah oposisi (terkonsentrasi di DPR) yang cenderung konfrontatif terhadap presiden. Solusi damai ini setidaknya untuk meminimalkan korban-korban kemanusiaan (*cost of life*) yang terjadi selama proses transisi demokrasi. Solusi damai ini artinya, Wahid harus melaku-

kan konsolidasi demokrasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, melakukan konsolidasi antar kekuatan politik guna mencapai konsensus minimal politik guna menggagas desain reformasi yang diinginkan.

Kedua, berinisiatif pranata-pranata sosial politik yang hancur di wilayah-wilayah konflik, setidaknya hal ini akan mengurangi sumber-sumber ketegangan politik di daerah.

Ketiga, konsisten dalam penegakan hukum terutama kasus-kasus KKN baik yang saat ini terganjal diusut.

Keempat, membuka jalur dialog multi poros politik, setidaknya untuk menghindari frustrasi politik pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam pemerintahannya.

Daftar Pustaka

- Guillermo O' Donnel dan Phillipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Oksenberg, Michel dan Dickson J. Bruce, *Kerangka Teoritis Reformasi Politik* (terj) New York, Harper-Collins Publishers, 1991
- Patriadi, Bayu, "Lembaga Politik Dan pelebagaan Demok-

rasi," makalah seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Negeri Jember kerjasama dengan Setjen MPR, 2-3 Februari 2001

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1995)

Sartori, Giovanni, "Understanding Pluralism," *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 4, October 1997.